

PRESS BRIEF

Diskusi Publik INDEF

“Di Balik Pertumbuhan 5,29%: Kuat di Angka, Rapuh di Fondasi?”

Jakarta, 6 Agustus 2026 — Diskusi publik INDEF bertajuk *“Di Balik Pertumbuhan 5,29%: Kuat di Angka, Rapuh di Fondasi?”* menyoroti data pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan II Tahun 2026 yang dirilis BPS. Diskusi publik tersebut membahas kualitas pertumbuhan ekonomi, kinerja sektoral, sumber-sumber pertumbuhan, tantangan yang dihadapi pada paruh kedua tahun 2026, serta implikasinya terhadap arah kebijakan ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.

Eko Listiyanto – Direktur Pengembangan Big Data INDEF, menilai capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% pada triwulan II-2026 tidak dapat dibaca semata sebagai kabar baik. Menurutnya, meskipun angka pertumbuhan tetap berada di atas lima persen, kualitas pertumbuhan justru menunjukkan pelemahan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Setelah efek musiman Ramadan dan Idulfitri menghilang, perekonomian kembali memasuki fase normal, namun normalitas tersebut memperlihatkan bahwa daya tahan ekonomi domestik masih sangat bergantung pada stimulus fiskal pemerintah.

Eko menjelaskan bahwa perlambatan konsumsi rumah tangga dari 5,52% pada triwulan I menjadi 5,06% pada triwulan II mengindikasikan daya beli masyarakat belum benar-benar pulih secara organik. Kenaikan konsumsi pemerintah yang mencapai hampir 16% melalui berbagai program belanja negara berhasil menopang pertumbuhan, tetapi sekaligus memperlihatkan tingginya ketergantungan ekonomi terhadap APBN. Di sisi lain, bantalan pertumbuhan dari sektor eksternal juga semakin melemah. Pertumbuhan ekspor turun tajam sementara impor tetap tinggi sehingga kontribusi ekspor neto terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi semakin negatif.

Lebih jauh, Eko menyoroti paradoks pada struktur pertumbuhan sektoral. Selama periode Februari hingga Mei 2026, sektor perdagangan memang mencatat pertumbuhan yang relatif tinggi yaitu sebesar 6,39% dengan kontribusi sebesar 13,02% terhadap PDB nasional, tetapi justru mengalami pengurangan tenaga kerja terbesar, sebanyak 128 ribu orang. Pada saat yang sama, meskipun angka kemiskinan di perdesaan sedikit menurun (dari 10,72% menjadi 10,67%), indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru memburuk. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat miskin semakin tertinggal, sementara manfaat pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi (lapisan atas).

Karena itu, Eko mendorong pemerintah untuk menggeser fokus kebijakan dari sekadar menjaga pertumbuhan menuju peningkatan kualitas pertumbuhan. Prioritas kebijakan perlu diarahkan pada penciptaan lapangan kerja formal yang mampu memperkuat daya beli organik masyarakat, percepatan program *reskilling* dan *up-skilling* bagi tenaga kerja di sektor perdagangan ritel konvensional agar mampu terserap ke dalam ekosistem perdagangan digital (*e-commerce* dan logistik), serta reformulasi program perlindungan sosial di perdesaan agar lebih berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat daripada sekadar bantuan tunai.

Ahmad Heri Firdaus – Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment INDEF, menilai pertumbuhan ekonomi triwulan II-2026 masih menyisakan persoalan struktural yang serius. Menurutnya, sektor-sektor yang selama ini menjadi kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto maupun penyerap tenaga kerja, yaitu sektor *tradable*, justru tumbuh di bawah rata-rata nasional. Sebaliknya, pertumbuhan lebih banyak ditopang oleh sektor-sektor jasa yang bersifat *non-tradable* dan relatif kurang menciptakan lapangan kerja, seperti infokom; akomodasi dan makan minum; serta pengadaan listrik dan gas. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menghasilkan efek pengganda (*spillover-effect*) yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat.

Heri juga menyoroti semakin beratnya tekanan terhadap sektor manufaktur. Kontraksi *Purchasing Managers' Index* (PMI) manufaktur S&P Global mencerminkan pelemahan permintaan, meningkatnya biaya produksi, serta masih kuatnya tekanan dari tingginya biaya energi, ketergantungan bahan baku impor, dan persaingan produk impor. Padahal, apabila Indonesia ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sektor manufaktur seharusnya mampu tumbuh secara konsisten di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebagai mesin utama industrialisasi.

Di sisi investasi, Heri menilai peningkatan realisasi investasi belum sepenuhnya berhasil dikonversi menjadi pertumbuhan ekonomi maupun penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Pertumbuhan investasi sebesar 7,1% (Rp 511,8 triliun) hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29%, sementara masih terdapat perbedaan data penyerapan tenaga kerja antara BKPM dan BPS yang perlu mendapatkan klarifikasi lebih lanjut dari kedua instansi tersebut. Di sisi lain, kualitas tenaga kerja Indonesia juga masih menjadi tantangan karena dominasi pekerja informal dan rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja belum sejalan dengan kebutuhan kebijakan hilirisasi yang berorientasi pada industri bernilai tambah tinggi.

Oleh sebab itu, Heri menegaskan bahwa agenda industrialisasi harus kembali ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan ekonomi. Dukungan terhadap industri manufaktur perlu diperkuat melalui perbaikan iklim investasi produktif, peningkatan kualitas tenaga kerja, penguatan daya saing industri domestik, serta kebijakan yang mampu mendorong investasi

menuju ekspansi kapasitas produksi dan inovasi, bukan sekadar peningkatan nilai realisasi investasi.

Izzudin Al Farras Adha – Kepala Center of Digital Economy and SMEs INDEF, menilai optimisme pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mendekati enam persen pada paruh kedua tahun 2026 perlu dicermati secara kritis. Menurutnya, sumber pertumbuhan pada semester pertama lebih banyak ditopang oleh momentum musiman seperti hari besar keagamaan nasional serta peningkatan konsumsi pemerintah. Memasuki semester kedua, momentum tersebut tidak lagi tersedia sehingga ruang akselerasi pertumbuhan menjadi semakin terbatas.

Farras menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menopang pertumbuhan sektor akomodasi dan makanan-minuman adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, melambatnya realisasi anggaran MBG diperkirakan akan mengurangi kontribusi program tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua tahun ini. Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas pelaksanaan anggaran agar alokasi fiskal mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih optimal.

Di sisi lain, Farras mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi digital tidak otomatis menciptakan pertumbuhan yang inklusif bagi UMKM. Meningkatnya transaksi melalui platform digital belum tentu menghasilkan penyerapan tenaga kerja yang lebih besar di sektor perdagangan. Bahkan, terdapat indikasi bahwa manfaat digitalisasi lebih banyak dinikmati oleh pelaku usaha berskala besar, sementara sebagian pelaku usaha mikro tetap menghadapi keterbatasan akses pasar dan produktivitas. Oleh karena itu, digitalisasi perlu dibarengi dengan kebijakan yang memastikan transformasi digital benar-benar meningkatkan daya saing UMKM, bukan sekadar memperbesar volume transaksi elektronik.

Farras menambahkan bahwa pemerintah perlu memperkuat kredibilitas komunikasi kebijakan ekonomi dengan menyelaraskan target pertumbuhan dan realisasi di lapangan. Target yang ambisius perlu ditopang oleh strategi implementasi yang jelas sehingga mampu membangun kepercayaan pelaku usaha sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Narahubung: Sarwo Edi (+62 813-8047-7878)